



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

4 Kades Terancam Dipanggil Kejari

Tidak Setor PBB

KEPAHIANG - Lantaran tak kunjung menyetorkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, empat Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepahiang terancam dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang.

Keempat kades yang akan dipanggil Kejari Kepahiang tersebut yakni Kades Bayung, Kades Langgar Jaya, Kades Limbur Lama dan Kades Ujan Mas Bawah.

Pt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Dahsi A, S.Sos melalui Kabid Pendapatan Musi Dayan, S.S mengatakan pembayaran realisasi PBB sudah merupakan ke-

wajiban dari kades selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan desa.

Untuk Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi, jumlah PBB tahun 2018 yang harus disetorkan kepada daerah adalah sebesar Rp 4,2 juta, Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir sebesar Rp 6,7 juta, Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir Rp 4,6 juta, dan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Rp 7,9 juta.

"Hingga saat ini keempat desa tersebut tidak kunjung menyetorkan realisasi PBB. Bahkan untuk anggaran pun tidak ada. Untuk itu kita telah berkoordinasi dengan Kejari Kepahiang agar bisa mendelusuri hal ini," jelas Musi Dayan.

Meski belum bisa mastikan duduk

permasalahan dari belum adanya setoran realisasi PBB dari keempat desa tersebut, namun Musi Dayan mengaku ada faktor penyebab yang membuat keempat desa ini sama sekali belum menyetorkan tanggungjawabnya.

Untuk itu dengan melalui mediasi yang akan dilakukan oleh Kejari Kepahiang nanti, Musi Dayan berharap bisa mengetahui masalah apa sebenarnya yang terjadi di keempat desa tersebut. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan solusi bagi keempat desa sehingga bisa segera melakukan pelunasan.

"Jika kita kalkulasikan, total PBB dari keempat desa ini mencapai Rp 23,6 juta. Meskipun tidak banyak,

namun tetap saja angka ini akan membantu Pemkab Kepahiang dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

Lebih lanjut Musi Dayan mengungkapkan, selain keempat Kades ini nantinya akan ada juga beberapa Kades lainnya yang akan dipanggil. Kades lain yang akan ikut dipanggil dalam waktu dekat nanti adalah desa yang setoran PBB-nya masih dibawah 50 persen dari target pembayaran sebelumnya.

"Untuk desa-desa yang setoran realisasi PBB-nya kurang dari 50 persen. Setelah ini pun akan dipanggil oleh Kejari Kepahiang guna dilakukan klarifikasi," demikian Musi Dayan. (sly)